

Komunitas ASEAN dan Kebutuhan Membangun *Multi-track Regionalism*

Oleh Ade M Wirasenjaya

Pengajar pada Departemen Hubungan Internasional

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Pendahuluan

Euphoria Komunitas ASEAN telah menjadi topik utama dalam berbagai riset dan proposal di perguruan tinggi. Berbagai negara di kawasan ini telah menyusun kampanye publik melalui berbagai media dalam rangka menyambut Komunitas ASEAN. Dengan segala variasi dari sisi derajat dan intensitasnya dalam sosialisasi, nampak jelas bahwa pembentukan Komunitas ASEAN pada tahun 2015 merupakan sebuah momentum yang sudah dipersiapkan oleh “para pemimpin negara-negara ASEAN”. Penting untuk memberi tekanan pada “para pemimpin negara-negara ASEAN” dalam tulisan ini mengingat arsitektur kawasan ASEAN menjelang 2015 sepenuhnya mencerminkan karakteristik dan pola-pola pengambilan keputusan dalam asosiasi ini yang terus dipelihara sejak lama, yakni memberi porsi yang sangat besar – jika bukan amat dominan – pada peran negara.

Jalur Tunggal Regionalisme

Dalam berbagai putaran perundingan dan pertemuan puncak para pemimpin di negara-negara ASEAN, arsitektur kerjasama regional Asia Tenggara dipastikan akan mengalami transformasi yang cukup signifikan. Momentum tersebut muncul terutama setelah ASEAN melaksanakan Pertemuan Puncak yang ke-9 di Bali, Oktober 2003. Melalui konsensus Bali Concord II, ASEAN menyepakati pembentukan ASEAN Community 2015. Peta jalan (*road map*) bagi pencapaian Komunitas ASEAN 2015 kemudian dikukuhkan pada KTT ASEAN ke-14 yang diselenggarakan di Cha-am, Thailand tahun 2009. Di bawah “tagline” *One Vision, One Identity, One Community*, 10 negara ASEAN sepakat untuk mencapai tiga pilar penting sebagaimana yang

diputuskan dalam Bali Concord II (*Roadmap for an ASEAN Community 2009-2015, ASEAN Secretariat, 2013*). Peta jalan tersebut memperlihatkan secara detail dan sistematis upaya-upaya yang harus dilakukan negara-negara ASEAN dan masyarakat di kawasan ini menjelang 2015.

Negara-negara ASEAN sepakat untuk menopang Komunitas ASEAN tahun 2015 dengan tiga pilar utama. Ketiga pilar tersebut adalah *ASEAN Security Community (ASC)*, *ASEAN Economic Community (AEC)* dan *ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC)*. Inilah tiga pilar yang banyak dianggap akan membawa paradigma baru yang akan membawa masyarakat Asia Tenggara ke arah identitas dan komunitas yang trans-nasional dan lebih kosmopolitan. Berbagai pertemuan yang dilakukan oleh para petinggi ASEAN selalu diarahkan pada upaya pencapaian tiga pilar tersebut, meskipun banyak anggapan bahwa aspek ekonomi (AEC) nampak lebih menyita perhatian dibanding dua pilar lain yakni keamanan dan sosial-budaya.

Desain regionalisme baru akan menjadi pertarungan masyarakat Asia Tenggara yang akan mengalami pertumbuhan populasi cukup signifikan menjelang dan setelah 2015. Berdasarkan prediksi yang dirilis pada KTT ASEAN di Brunei Darussalam tahun 2013, jumlah penduduk 10 negara anggota ASEAN diperkirakan akan mencapai 741,2 juta jiwa pada 2035, meningkat dibandingkan 2015 yang diperkirakan sebanyak 633,1 juta jiwa. Pertumbuhan penduduk rata-rata ASEAN per tahun mencapai 0,85 persen dan Filipina menjadi negara dengan pertumbuhan penduduk tertinggi (1,44 %), diikuti Malaysia (1,45 %), Brunei Darussalam (1,40 %), Laos (1,06 %), Kamboja (1%), Singapura (0,93 %), Indonesia (0,74 %), Vietnam (0,65 %) dan Thailand (0,29 %).

Roadmap memperlihatkan asertivitas ASEAN dalam menyongsong era baru, baik dalam merepon isu-isu politik baru seperti demokratisasi dan hak asasi manusia (HAM), maupun dalam merespon isu-isu non-tradisional seperti soal penghormatan terhadap pluralisme budaya masing-masing negara hingga masalah korupsi (*Roadmap, ibid: 7-8*). Namun pada sisi lain, *Roadmap* memperlihatkan bangunan perseptual yang sangat mengindikasikan kuatnya pola-pola regionalisme yang elitis atau sering disebut regionalisme dari atas (*regionalism from above*).

Di lain sisi, *roadmap* menuju pembentukan Komunitas ASEAN 2015 sesungguhnya merupakan sebuah gejala yang “ahistoris” mengingat Asia Tenggara sejak mula bukanlah sebuah konsep “kawasan”. Menurut analisis ahli sejarah Asia Tenggara, Anthony Reid (1999), Asia Tenggara adalah sebuah kawasan yang secara historis berbeda kelahirannya dengan kawasan lain di dunia seperti Eropa Barat, India, Dunia Arab, Cina, bahkan kawasan Asia Timur yang amat dipengaruhi oleh kultur Cina (*cinized*). Bagi Reid pula, “Asia Tenggara tidak mempunyai persamaan agama, bahasa atau kebudayaan klasik yang besar dan tidak pernah menjadi bagian dari sebuah *polity* (negara) yang tunggal. Penyebutan Asia Tenggara bahkan diberikan oleh pihak-pihak luar untuk memudahkan secara geografis, yang kemudian diganti dengan istilah-istilah lain yang bahkan jauh lebih tidak memuaskan seperti India Jauh (*Further India*) atau Indo-China (Reid, 1999: 4-5). Reid hanya ingin menegaskan bahwa konstruksi eksternal merupakan hal yang melekat pada pembentukan kawasan Asia Tenggara sejak kelahirannya.

Hampir setengah abad berdiri, ASEAN telah menjadi apa yang oleh seorang penulis disebut “*one the most enduring inter-governmental organizations outside Europe*” (Beeson, 2007: 216). Di luar Uni Eropa, inilah kerjasama regional yang dipandang memiliki kemampuan melakukan adaptasi antara dinamika eksternal dengan perubahan yang berlangsung pada level internal kawasan. Daya tahan ASEAN sebagai kelompok kerjasama regional menjadikannya sebagai sebuah asosiasi yang unik dan semakin penting, baik secara ekonomi maupun politik. Sejak dibentuk tahun 1967, ASEAN juga telah memperlihatkan persitensinya dalam dinamika hubungan internasional dengan segala konstelasi yang mengiringinya. Di kawasan ini, misalnya, tidak muncul konflik-konflik terbuka dan berdurasi sangat panjang yang melibatkan perseteruan antar negara.

Salah satu karakteristik ASEAN adalah kuatnya model-model penyelesaian konflik khas Asia yang menempatkan harmoni, kooperasi dan non-intervensi. Dalam diplomasi, para pemimpin ASEAN lebih suka mengemukakan pola-pola “quite diplomacy” atau diplomasi sunyi dalam upaya penyelesaian persoalan. Pola-pola

penyelesaian seperti itu telah menjebak ASEAN ke dalam ritualisme yang acapkali gagal menangkap perubahan drastis yang berlangsung pada level sosial dan budaya.

Fragmentasi Aktor Kawasan

Seiring dengan keinginan membentuk Komunitas ASEAN tahun 2015, sejumlah persoalan mulai mengemuka. Isu-isu non-tradisional yang semula tidak menjadi perhatian dan tidak terlihat, akhir-akhir ini mulai muncul. Isu-isu itu misalnya tentang perbatasan (*border*), lingkungan (khususnya hutan), pekerja migran serta perdagangan manusia merupakan beberapa contoh yang harus diakomodasi dalam desain regionalisme baru Asia Tenggara. Tak juga kalah pentingnya adalah isu perdagangan manusia dimana Asia Tenggara merupakan salah satu zona yang dianggap paling berbahaya di dunia. Sekuritisasi atas problem-problem non-tradisional membutuhkan tidak hanya perubahan persepsional dari aktor tradisional, tetapi juga membutuhkan akomodasi atas persepsi lain dari aktor baru yang juga berkecambah dalam ruang transnasional Asia Tenggara hari ini.

Dilihat secara makro, fase ASEAN sebagai asosiasi kerjasama antar-negara bisa dibagi ke dalam dua periode penting. Kedua periode itu menunjukkan pola-pola peralihan, sebelum kemudian gagasan integrasi komunitas ASEAN muncul pada KTT ke-13 di Singapura (1997). KTT tersebut nampaknya menjadi titik kulminasi yang penting setelah fase *regionalism-making process* pada dua dasawarsa pertama (1960-1980 an) hingga fase *developmental-state regionalism* pada dua dasawarsa berikutnya (1980-an hingga sekarang).

Fase pertama menunjuk pada kreasi dan intrusi negara-negara Barat yang membutuhkan zona penyangga dari konflik ideologis Timur-Barat saat itu. ASEAN dibayangkan sebagai kisah sukses modernisasi Barat melalui *contagion effect* dan *demonstration effect*. Efek pertama menyangkut upaya-upaya Barat (khususnya Amerika Serikat) dalam menularkan developmentalisme di kawasan Asia Tenggara dengan cara-cara yang amat pragmatis dan efisien. Motif ini tidak lepas dari posisi dan peran Asia yang begitu penting bagi perluasan pengaruh dan kepentingan global Amerika Serikat. Seperti ditulis Robert J Lieber, baik secara politik maupun ekonomi,

Asia merupakan tempat bagi ribuan pasukan penjaga keamanan dan investasi besar-besaran dari negara Paman Sam.¹ Amerika membangun kerjasama keamanan dengan negara-negara penting di kawasan ini seperti Philipina, Indonesia, Vietnam, India, Pakistan dan tentu saja, Korea Selatan dan Jepang.² Beberapa skema khusus tentang kerjasama keamanan juga getol dilakukan Amerika Serikat melalui keterlibatan yang intensif dalam ASEAN Regional Forum (ARF) untuk terus memelihara dan memastikan kawasan Asia Tenggara sebagai kawasan yang aman secara politik dan ekonomi.

Efek kedua -- *demonstration effect* -- menyangkut upaya-upaya kawasan melakukan akselerasi modernisasi. Untuk dua program besar tersebut, jelas kekuatan dan preferensi negara-negara Barat seperti Amerika tidak akan absen. Asia Tenggara adalah *role model* bagi penyebaran modernisasi Barat (*Simpson, 2008*). Kedua upaya tersebut nampaknya sukses dijalankan, baik oleh Barat sendiri maupun oleh negara-negara ASEAN pada beberapa dekade berikutnya.

Fase kedua menunjuk pada akibat langsung dari dampak munculnya konsolidasi negara sebagai aktor pembangunan (*developmental-state*) di sejumlah negara Asia, dimana Asia Tenggara digambarkan sebagai rombongan angsa yang mengikuti si Angsa utama Asia, yakni Jepang.³ Beberapa ilmuwan menyebut bahwa regionalisme ASEAN adalah *developmental-state regionalism* dimana negara menjadi penentu dan menjadi aktor utama. *Developmental-state* merupakan model kebijakan pembangunan yang menempatkan negara sebagai penentu dan eksekutor sekaligus. Dari sisi isu, model ini lebih memberi perhatian pada aspek ekonomi (*Beeson, 2007*).

¹ Robert J Lieber, *The American Era: Power and Strategy for the 21st Century*, Cambridge University Press,, 2006, hal. 159.

² Ibid.

³ Teori “flying geese” atau angsa terbang begitu populer bagi pengkaji teori pembangunan dan ekonomi-politik internasional, sebuah model pembacaan untuk melihat kepemimpinan Jepang dalam industri dan investasi di Asia. Teori ini menyebut Jepang sebagai role model industri Asia, dan menjadi pemimpin rombongan angsa-angsa di kawasan Asia untuk terbang di belakang Jepang. Lihat misalnya Kaniska Jayasurya “Southeast Asia’s Embedded Mercantilism in Crisis: International Strategies and Domestic Coalition”, dalam *Andrew TH Tan and Keneth Boudin (eds.), Non-Traditional Security Issue in Southeast Asia*, Institute of Defence and Strategic Institute, Singapore (2001).

Sementara itu Kaniskha Jayasurya (2001: 33) menyebut fase kepemimpinan industri Jepang telah melahirkan fenomena “embedded mercantilism” di Asia Tenggara dimana negara menjadi aktor yang melekat dalam seluruh bangunan pencapaian ekonomi kawasan. Akibatnya, inisiatif-inisiatif regional selalu berorientasi pada logika-logika pertumbuhan, juga pada saat yang sama mengkualifikasi aktor-aktor yang seharusnya terlibat dalam dinamika regional.

Untuk waktu yang panjang, negara menjadi aktor dan eksekutor penting dalam berbagai skema regionalisme yang dicanangkan para pemimpin Asia Tenggara. Perubahan yang cukup signifikan terjadi menjelang dasawarsa 90-an ketika arus migrasi manusia dan gerakan masyarakat transnasional mulai memberi perspektif lain tentang arah regionalisme. Kekuatan hegemonik pada fase pertama, yakni Amerika Serikat, yang memberi pengaruh politik bagi pembentukan dan *road map* ASEAN pada masa-masa awal, kini secara perlahan mulai menghadapi banyak kompetitor. Hal ini juga tak lepas dari munculnya kekuatan *middle-powers* dalam politik maupun ekonomi internasional. Sedang kekuatan hegemonik pada fase kedua, si angsa Jepang, juga mulai menyusut peran-peran ekonominya sehubungan dengan munculnya kekuatan ekonomi baru dari Asia seperti Korea Selatan, India, China dan Taiwan. Daya tahan negara-negara ASEAN menghadapi krisis ekonomi tahun 1997 nampaknya menjadi titik penting bagi ASEAN untuk lebih bebas membentuk desain dan arsitektur kerjasama, dari yang semua amat longgar menjadi sebuah kerjasama yang lebih sistematis dan struktural. Inilah yang kemudian melahirkan sebuah prinsip yang dipegang teguh oleh negara-negara ASEAN, yakni “ASEAN Way”.

Oleh Acharya (2001), “ASEAN Way” didefinisikan sebagai: “...*a process of regional interactions and cooperation based on discreteness, informality, consensus building and non-confrontational bargaining styles*”. Pilihan pada “Jalan ASEAN” nampaknya lahir pada mantra-mantra pembangunan yang ingin mempercepat akselerasi pertumbuhan ekonomi regional. Di sisi lain, pilihan ini tak lepas dari problem-problem mendasar yang menimpa hampir semua masyarakat Asia Tenggara terutama dalam hal hak-hak politik, partisipasi dan juga posisinya dalam pembangunan yang seringkali marjinal.

Hampir dipastikan, rute Masyarakat ASEAN akan sangat berbeda dengan misalnya, rute Masyarakat Eropa (ME). Pada kasus ME, ada semacam keinginan untuk menjadi blok resistensi dari laju dan pengaruh Amerika Serikat. Pada rute Masyarakat ASEAN, sebagaimana sering muncul dalam sejumlah dokumen hasil serial KTT, persistensi nampaknya menjadi target besar – yakni bagaimana transformasi ASEAN sebagai penyangga kapitalisme pinggiran –bisa terus dipelihara. Selain itu, menjadikan Uni Eropa sebagai model regionalisme baru juga menyisakan persoalan karena mozaik kebudayaan kedua kawasan juga amat berbeda.

Ada dua fenomena penting yang layak diidentifikasi menjelang dimasukinya era *ASEAN Community* dilihat dari sisi perubahan aktor serta institusi baik pada level eksternal maupun internal. *Pertama*, berkurangnya regimentasi kekuatan tradisional dalam politik internasional di Asia Tenggara. *Kedua*, pada saat yang sama, terdapat pula proses berkurangnya peran negara sebagai akibat langsung proses transisi demokrasi di sejumlah negara Asia Tenggara. Fenomena pertama memunculkan makin banyaknya ruang-ruang interaksi dan kooperasi antara negara-negara ASEAN dengan berbagai aktor baru dalam hubungan internasional.

Menarik sekali bahwa dalam konteks ini, pola-pola kerjasama yang berlangsung lebih didasarkan pada isu ketimbang ikatan historis, apalagi ideologis. Masing-masing isu yang kini populer dalam hubungan internasional seperti hak-hak ekonomi, sosial, budaya (hak-hak ekosob) dan perubahan iklim kini memiliki rejimnya sendiri-sendiri. Sejumlah proyek perubahan iklim di sejumlah negara ASEAN kini menampilkan hubungan yang cukup erat dengan negara-negara Eropa seperti Finlandia dan Norwegia. Isu-isu keamanan baru seperti terorisme membuat sejumlah negara begitu dekat dengan Australia. Dengan lanskap semacam itu, sebenarnya tidak ada lagi kekuatan eksternal yang dominan di ASEAN. Ini juga memberitahukan tentang momentum yang tepat dan strategis untuk memperluas cakupan, dimensi dan proyeksi integrasi ASEAN 2015 yang datang.

Fenomena kedua dimana peran dan posisi negara juga berangsur surut sehubungan dengan hadirnya kekuatan masyarakat transnasional boleh jadi merupakan

akibat bawaan dari fenomena pertama. Kekuatan masyarakat sipil seperti non-state organizations (NGOs) di ASEAN kini tak bisa diabaikan peran-perannya. Berbagai isu baru dalam lingkup regional mulai muncul sebagai akibat langsung globalisasi dan kehadiran aktor-aktor di luar negara yang semakin artikulatif membentuk komunitas di luar radar negara. Kekuatan masyarakat sipil seperti kaum aktivis telah merancang inisiatif-inisiatif yang menghubungkan berbagai elemen dan isu yang melintas-batas negara

Prinsip tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain yang selama ini dipegang sebagai tatakrama regional oleh ASEAN kini mulai banyak menuai kritik sejumlah kalangan. Selama ini terdapat benturan persepsional menyangkut sejumlah isu besar seperti penegakkan hak asasi manusia dan demokrasi. Begitu juga dalam menghadapi isu-isu potensial seperti bencana kabut asap. Kasus ini pernah menjadi isu yang menyita perhatian hebat tahun 1997-1999. Ketegangan terjadi antara Indonesia, Malaysia dan Brunei Darusalam. Indonesia dianggap sebagai biang keladi dari bencana tersebut. Pada saat itu tidak ada upaya ASEAN untuk mengatasi ini. Selain karena tidak memiliki instrumen yang jelas, ASEAN meyakini bahwa Negara-negara tetangga yang paling dirugikan seperti Malaysia, Singapura, dan Brunei cenderung menyikapi melalui protes dengan gaya diplomasi yang sangat sopan. Beberapa bantuan dan asistensi juga ditawarkan oleh Malaysia dan Singapura.

Keterbatasan pendekatan *state-centric* menyisakan problem representasi. Artinya, cara pandang negara akan lebih banyak ditentukan oleh kalkulasi politik dan teknokratis. Padahal dalam penanganan masalah kabut asap misalnya, persoalannya jauh lebih kompleks. Aspek-aspek *vernacular* seperti pandangan dunia (*world view*) komunitas hutan, persoalan ekonomi dan sosial yang dihadapi pada masyarakat pedalaman, jauh dari bayangan negara. Legitimasi negara untuk merepresentasikan masalah lingkungan juga seringkali menjadi persoalan. Lintas-batas manusia di hutan yang berbatasan langsung dengan negara tetangga seperti di hutan Kalimantan memiliki *habitus* yang telah lama terbentuk dimana hutan telah menjadi medium identifikasi yang melampaui batas-batas administratif sebuah negara.

Berbagai upaya penanganan lingkungan di kawasan ASEAN mencerminkan pendekatan realis dimana dominasi aktor negara masih sangat kuat. Dalam rangka untuk menyelesaikan masalah polusi asap misalnya, negara-negara ASEAN telah melakukan beberapa upaya dan akhirnya pada tahun 2002 ASEAN menyepakati sebuah komitmen bersama yang disebut *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution*. Dalam agreement ini setiap negara yang meratifikasi berkomitmen untuk ikut menyelesaikan masalah polusi asap di kawasan Asia Tenggara yang sebagian besar akibat kebakaran hutan di Indonesia.

Dalam isu hak asasi manusia, jejaring masyarakat sipil ASEAN yang bergiat dalam isu tersebut aktif mengajukan proposal pendirian Badan HAM ASEAN. Badan ini mencoba mengadopsi lembaga serupa yang sudah mapan di Eropa. Namun, proposal tersebut masih terbentur karena perbedaan persepsional dan visi penegakkan HAM di antara negara-negara ASEAN sendiri. Dua isu ini – lingkungan dan HAM, memberi gambaran tentang pada aspek mana sebenarnya kedaulatan negara masih diberlakukan dan pada aspek mana yang mulai mengalami peluluhan. Barangkali karena isu HAM masih terkait langsung dengan kekuasaan sejumlah negara di kawasan ini, negara-negara HAM menggunakan asas “menghormati kedaulatan” untuk menghindari konflik. Sementara pada isu lingkungan, gagasan tersebut nampak tidak cukup kuat digunakan. Bahkan dalam isu lingkungan, pengarusutamaan (*mainstreaming*) justru dilakukan oleh kalangan masyarakat sipil dan negara mengikuti semua desain, skope dan juga aksi yang dirancang masyarakat sipil.

Nampaknya mulai ada upaya-upaya untuk menegosiasikan kedaulatan pada beberapa isu yang muncul dalam hubungan antar bangsa kontemporer. Dalam Deklarasi yang ditandatangani sepuluh pemimpin ASEAN di Cha-am Hua Him, Thailand, tahun 2009, disepakati tentang road map ASEAN. Peta jalan itu memberi arah yang jelas tentang arsitektur kawasan Asia Tenggara menjelang dibentuknya komunitas ASEAN tahun 2015 yang akan datang. Hal ini sejalan dengan gagasan tentang pembentukan sebuah rezim. Pempel (*dalam Jakasurya, 2001*) mengajukan kerangka dasar mengapa sebuah rejim begitu penting untuk membangun aransemen baru di luar batas negara. Sebuah rejim harus memiliki tiga komponen dasar: adanya aliansi sosial-ekonomi, hadirnya institusi politik-ekonomi dan dimilikinya strategi kebijakan publik.

Cita-cita integrasi masyarakat ASEAN hanya bisa dilakukan melalui upaya menegosiasikan kedaulatan dari masing-masing aktor yang ada di kawasan. Sampai tulisan ini dibuat, berbagai negosiasi kedaulatan negara sudah berlangsung dalam kasus transisi demokrasi di Myanmar dan perundingan bersejarah pemerintah Filipina bangsa Moro di Filipina Selatan.

Dalam sebuah analisis, Alexander C Chandra (2009) mengemukakan tentang perlunya ASEAN mengubah jalan regionalisme dari yang terlalu elitis menjadi regionalisme yang populis. Sebenarnya di kalangan pemimpin ASEAN sendiri mulai tumbuh kesadaran untuk melibatkan sebanyak mungkin aktor dalam mengembangkan Komunitas ASEAN. Hanya saja, menurut Chandra, para pemimpin di kawasan ini lebih menyukai term *people-oriented* ketimbang *people-centred*. Keduanya jelas mengimplikasikan dua hal yang berbeda. Dalam tatapan Chanda: “.....*the people-oriented ASEAN can be interpreted that the policies pursued by the Association’s policy-makers shall be oriented toward the concerns and interests of the people. However, under this principle, the final decision making still lies amongst the region’s political elite. In contrast, ASEAN as a people-centred organization call for the grouping to place people at the heart, or centre, of its decision-making process....*”

Disukai atau tidak oleh para pengambil kebijakan di ASEAN, kehadiran masyarakat sipil trans-nasional telah menjadi aktor yang berpengaruh dalam mengajukan sudut pandang lain tentang arah regionalisme Asia Tenggara. Kelompok-kelompok masyarakat sipil tersebut lahir melalui proses perluasan norma demokrasi di sebagian besar negara ASEAN, maupun sebagai akibat langsung dari berubahnya watak hubungan internasional pada umumnya. Seperti disinggung sebelumnya, berbagai inisiatif yang lahir dalam merespon isu-isu non-tradisional telah melahirkan pola-pola baru kerjasama, aliansi juga kolaborasi masyarakat sipil baik di dalam kawasan Asia Tenggara sendiri maupun yang dibangun oleh jaringan masyarakat sipil yang melintasi-batas benua.

Kelompok-kelompok masyarakat sipil yang cukup artikulatif dalam merespon serta membangun kerjasama kolaboratif misalnya LSM/NGO, perguruan tinggi

(universitas), kelompok keagamaan (*faith-based movement*), komunitas masyarakat lokal, jurnalis serta kelompok-kelompok baru lainnya. Jalur-jalur baru diplomasi semakin terbuka. Semua itu memberi agenda yang cukup jelas tentang perlunya ASEAN mengembangkan regionalisme multi-jalur (*multi-track regionalism*) di masa depan.****

REFERENSI

- ASEAN Secretariat, *Roadmap for an ASEAN Community 2009-2015*, Jakarta, 2009.
- Beeson, Mark, *Regionalism and Globalization in East Asia: Politics, Security and Economic Development*, 2007
- Boutin, Keneth dan Tan, Andrew, *Non-traditional Security Issues*, Institute of Defense and Strategic Studies, Singapore, 2001.
- Chandra, Alexander C, *Civil Society in Search of an Alternative Regionalism in ASEAN*, International Institute for Sustainable Development, 2009
- Lake, David dan Morgan, Patrick M, *Regional Orders: Building Security in New World*, Pennsylvania State University, USA, 1997.
- Linklater, Andrew, *The Transformation of Political Community*, Polity Press, 1998.
- Simpson, Bradley, *Economic With Guns*, Stanford University, 2008.
- Terrence Chong and Elies (editor), *An ASEAN Community for All: Exploring the Scope for Civil Society Engagement*, Friedrich-Ebert-Stiftung, Office for Regional Cooperation in Asia, 2011
- Wirasenjaya, Ade dan Ratih Herningtyas *ASEAN Way at the Crossroad*, The Jakarta Post, 17 Juli 2013